

**PENGARUH STANDAR AKUNTANSI  
PEMERINTAHAN, KETAATAN PADA PERATURAN  
PERUNDANGAN DAN KOMPETENSI TERHADAP  
AKUNTABILITAS KINERJA PEGAWAI INSTANSI  
PEMERINTAH**

**(Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara)**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar  
Sarjana Akuntansi



Oleh:

**NUR EKA SARI  
1701035130  
S1-AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
SAMARINDA  
2022**

**PENGARUH STANDAR AKUNTANSI  
PEMERINTAHAN, KETAATAN PADA PERATURAN  
PERUNDANGAN DAN KOMPETENSI TERHADAP  
AKUNTABILITAS KINERJA PEGAWAI INSTANSI  
PEMERINTAH**

**(Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara)**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar  
Sarjana Akuntansi



Oleh:

**NUR EKA SARI  
1701035130  
S1-AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
SAMARINDA  
2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan dan Kompetensi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pegawai Instansi Pemerintah (Pada OPD Kabupaten Kutai Kartanegara)

Nama : Nur Eka Sari

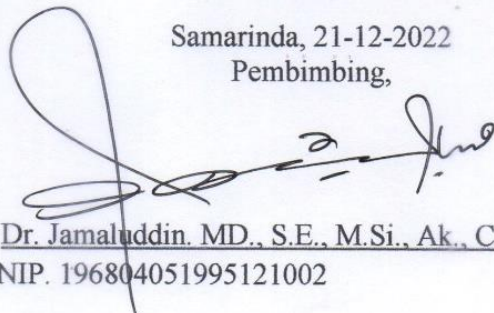
NIM : 1701035130

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : S1 Akuntansi

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui,

Samarinda, 21-12-2022  
Pembimbing,  
  
Dr. Jamaluddin. MD., S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS.  
NIP. 196804051995121002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis  
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hudaya, M. Si  
NIP.19620513 198811 2 001

Lulus Tanggal Ujian : 21-12-2022

## SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS

Judul Skripsi : Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan dan Kompetensi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pegawai Instansi Pemerintah (Pada OPD Kabupaten Kutai Kartanegara)

Nama : Nur Eka Sari

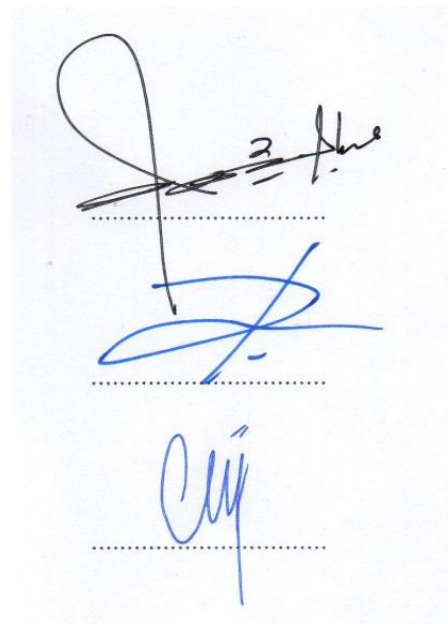
NIM : 1701035130

Hari : Rabu

Tanggal Ujian : 21-12-2022

### TIM PENGUJI

1. Dr. Jamaluddin MD, S.E., M.Si., Ak  
NIP. 19680405 199512 1 002
2. Dr. Wulan Iyhg Ratna Sari, S.E., M.Si., CSP  
NIP. 19770328 200312 2 001
3. Mega Nosita, S.E., M.Acc., CSRS., CSRA  
NIP. 19910607 201903 2 000



## ABSTRAK

Nur Eka Sari, 2022. **Pengaruh standar akuntansi pemerintahan, ketaatan pada peraturan perundangan dan kompetensi terhadap akuntabilitas kinerja pegawai instansi pemerintah (pada organisasi perangkat daerah kabupaten kutai kartanegara)**. Di Bawah Bimbingan Bapak Jamaluddin MD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan dan Kompetensi terhadap Akuntabilitas Kinerja pegawai Instansi Pemerintah pada OPD Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data dilakukan dengan media kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja, 2) Ketaatan Pada Peraturan Perundangan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja, 3) Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja, 4) Standar Akuntansi Pemerintahan, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan, dan Kompetensi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pegawai Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

**Kata kunci:** Standar Akuntansi Pemerintahan, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan, Kompetensi, Akuntabilitas Kinerja.

## ABSTRACT

Nur Eka Sari, 2022. **Effect of government accounting standards, compliance towards legislation and competence on performance accountability of government employees (at the regional organization of kutai kartanegara)**. Supervised by Mr. Jamaluddin MD. This study aims to determine the effect of government accounting standards, compliance towards legislation and competence on the performance accountability of government employees at the regional organization (*OPD*) of Kutai Kartanegara. This research focused on quantitative research design using a survey method. The type of data used for this research is primary data. To collect the data, the researcher used a questionnaire as a research instrument. The technique of data analysis is multiple linear regression using the SPSS program version 25. The results showed that: 1) Government accounting standards have a significant effect on accountability performance, 2) Compliance towards legislation also has a significant effect towards accountability performance, 3) Competence has a significant effect on accountability performance, 4) Government accounting standards, compliance towards legislation, and competence have simultaneously significant effects on performance accountability of government employees at Kutai Kartanegara.

**Keywords:** Government Accounting Standards, Compliance Towards Legislation, Competence, Accountability Performance.

## RIWAYAT HIDUP



**Nur Eka Sari**, lahir pada tanggal 6 Oktober 1998 di Kabupaten Kutai Kartanegara. Merupakan anak kedua dari lima bersaudara dari pasangan Alimi dan Nurjanna.

Penulis memulai pendidikan formal pada tahun 2004 di SDN 013 Sanipah dan lulus pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 4 Samboja lulus pada tahun 2014. Selanjutnya masuk di SMK Pesisir Samboja dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2017, penulis terdaftar sebagai mahasiswa di jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman pada program Strata Satu (S1) melalui jalur SNMPTN.

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan. Saya bersedia skripsi dan gelar sarjana atas nama saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPERLUAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman,  
saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Eka Sari  
NIM : 1701035130  
Program Studi : S1 – Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui untuk memberikan izin kepada pihak **UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman.** Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul **“Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Ketaatan pada Peraturan Perundangan dan Kompetensi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pegawai Instansi Pemerintah (Pada OPD Kabupaten Kutai Kartanegara)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini kepada UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Samarinda, 26 Januari 2023

Yang Menyatakan,



Nur Eka Sari

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan segala karunia dan limpahan rahmatnya, serta junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita, yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: “Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Ketaatan pada Peraturan Perundangan dan Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pegawai Instansi Pemerintah (Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara)”.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan baik moral maupun materi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan, yaitu kepada:

1. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si selaku Rektor dan seluruh Civitas Akademik Universitas Mulawarman
2. Prof. Dr. Hj. Syarifah Hudaya, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman
3. Dwi Risma Deviyanti, S.E., M. Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman
4. Dr. H. Zaki Fakhroni, Ak., CA., CTA., CfrA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman

5. Dr. Jamaluddin. MD., S.E., M. Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing yang bersedia meluangkan waktu dan dalam membimbing penulis, memberikan masukan, arahan, serta saran mulai dari proposal hingga penyelesaian skripsi
6. Rusliansyah, SE, M.Si. selaku dosen pembimbing akademikyang telah memberikan bimbingan dan nasehat selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
7. Bapak dan Ibu dosen, dan seluruh civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman
8. Kepada kedua Orangtua Penulis, Bapak Alimi dan Ibu Nurjanna yang telah melimpahkan kasih sayang, doa serta dukungan kepada penulis. Kemudian kepada Kakak penulis Nur Indah Sari, dan Adik Penulis Muhammad Baharudin, Muhammad Aripudin, serta Nur Aini Sari, penulis ucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya yang menjadi penyemangat bagi penulis sehingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada suami tercinta Ikbal yang dengan penuh pengertian tidak pernah berhenti memberikan dukungan, kasih sayang, doa serta banyak hal lainnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat penulis Nur Azizah Rahmi, Rina Angelina Praditya, Nurul Zakiah, Yeyen Maemunah, Wiwin Pertiwi, Ferdi, Andi Mahludin, Yunus, Arwini dan Satriani yang telah memotivasi, mendoakan dan

menjadi penyemangat bagi penulis. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk segala partisipasi, dukungan, kebersamaan, sukacita, bantuan, inspirasi dan hiburan untuk penulis hingga penulis dapat tetap semangat dan terus berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman-teman kos Mba Yanti, Kak Wiwi, Mba Senap, dan Mba Imeh serta Bapak dan Ibu kos yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.
12. Teman-teman angkatan 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman dan teman-teman kantor CV. AJM, Novi dan Mutia serta Bapak dan Ibu Bos CV. AJM yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. Serta kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak.

Samarinda, 10-10-2022

Nur Eka Sari

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1. Landasan Teori.....	7
2.2. Penelitian Terdahulu .....	16
2.3. Rerangka Konseptual .....	19
2.4. Pengembangan Hipotesis .....	19
2.5. Model Penelitian .....	26
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
3.1. Desain Penelitian.....	27
3.2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	27
3.3. Jenis dan Sumber Data .....	33
3.4. Populasi dan Sampel .....	34
3.5. Metode Pengumpulan Data .....	35
3.6. Alat Analisis dan Pengujian Hipotesis .....	35

<b>BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	40
4.2. Pembahasan.....	56
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
5.1. Simpulan .....	62
5.2. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	18
Tabel 4.1 Data Kuesioner.....	40
Tabel 4.2 Usia Responden .....	41
Tabel 4.3 Jenis Kelamin Responden .....	42
Tabel 4.4 Pendidikan Terakhir Responden .....	42
Tabel 4.5 Latar Belakang Pendidikan Responden .....	43
Tabel 4.6 Jabatan Responden.....	44
Tabel 4.7 Analisis Statistik Deskriptif .....	45
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas .....	47
Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas.....	48
Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas .....	49
Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinearitas .....	50
Tabel 4.12 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	51
Tabel 4.13 Analisis Regresi Linear Berganda .....	52
Tabel 4.14 Hasil Uji F.....	53
Tabel 4.15 Hasil Uji T .....	54
Tabel 4.16 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	56

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Rerangka Konseptual .....	19
Gambar 2.2 Model Penelitian .....	26



## DAFTAR SINGKATAN

AKIP	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASN	Aparatur Sipil Negara
FASB	Financial Accounting Standard Board
LAKIP	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAN	Lembaga Administrasi Negara
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
PANRB	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
SAP	Standar Akuntansi Pemerintahan
SK	Surat Keputusan
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SPSS	Statistical Program for Soscial Science
UUD	Undang-Undang Dasar

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran 1. Kuesioner Penelitian.....	68
Lampiran 2. Sampel Penelitian .....	73
Lampiran 3. Tabulasi Data.....	74
Lampiran 4. Uji Validitas.....	78
Lampiran 5. Uji Reliabilitas.....	82
Lampiran 6. Uji Asumsi Klasik .....	83
Lampiran 7. Uji Hipotesis .....	85

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Akuntabilitas kinerja menjadi bagian dari isu suatu kebijakan yang sangat strategis saat ini di Indonesia, terutama pada instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik, akan berdampak pada terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Chrisnandi, (2016), menyatakan bahwa “dengan memperbaiki akuntabilitas kinerja, maka akan memperbaiki tata kelola pemerintahan Indonesia”. Menerapkan akuntabilitas kinerja bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui apa yang dilakukan oleh kantor instansi pemerintah melalui program dan kebijakannya, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Rendahnya akuntabilitas kinerja instansi-instansi Pemerintah di Indonesia, salah satu penyebabnya adalah terjadinya praktik kecurangan diberbagai instansi Pemerintah.

Kinerja instansi pemerintahan adalah penggambaran pencapaian tujuan atau sasaran organisasi pemerintahan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi kantor yang menunjukkan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program dan kebijakan yang ditetapkan. Untuk menjamin tanggung jawab akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah, telah dibuat kerangka tanggung jawab yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP tersebut kemudian diterapkan melalui pembuatan target kinerja yang disertai dengan indikator kinerja yang menggambarkan pencapaian organisasi pemerintah. (Wardhana, 2015).

Wardhana, (2015) menjelaskan bahwa dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), kinerja pemerintah akan dinilai secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, LAKIP akan dapat mendorong pemerintah melaksanakan *good governance*, memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dengan pemerintah, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan terwujudnya akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu didukung oleh faktor aparatur pemerintah yang kompeten, ketaatan pada peraturan perundangan dan penerapan SAP. Hal ini diperlukan agar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tidak mengandung informasi yang salah, dapat dipercaya, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketaatan pada peraturan undang-undang merupakan komponen penting yang berkaitan dengan kinerja organisasi pemerintah. Dengan demikian, laporan pertanggungjawaban yang disampaikan diyakini akan tepat dan sesuai untuk memenuhi komitmen kepada pemerintah pusat dan

kebutuhan data publik. Namun, ketidakpatuhan dan kekhawatiran terhadap penggunaan standar akuntansi pemerintah sesuai pedoman yang bersangkutan sebenarnya terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya, untuk mengakui tanggung jawab atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penting untuk menyetujui undang-undang yang telah berlaku. (Putri, 2015).

Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 ayat 10 menyatakan kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kompetensi aparatur merujuk pada pendekatan perilaku, perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul/superior. Keterampilan perilaku terkait tugas, bisa dikuasai melalui pembelajaran dan bisa ditingkatkan melalui latihan dan bantuan orang lain. (Septiani, dkk 2020) mengemukakan bahwa kompetensi mempengaruhi langsung tingkat kinerja organisasi. Dengan memiliki aparatur yang mempunyai kompetensi yang tinggi akan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Untuk menunjang akuntabilitas kinerja yang baik juga diperlukan adanya penerapan standar akuntansi pemerintah baik. Menurut (Bastian, 2013) Standar Akuntansi Pemerintah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi

keuangan pemerintah daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan instansi pemerintah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Fatmala, 2014), yaitu pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD di Kabupaten Bengkulu Tengah. Dengan menambah satu variabel baru yaitu kompetensi. Peneliti memilih untuk mengganti objek penelitian pada OPD Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.

Hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2019 mendapatkan predikat BB (sangat baik), namun masih perlu perbaikan pada : (1) laporan target kinerja belum bisa dimonitor pencapaiannya, (2) laporan kinerja belum menyajikan info pencapaian sasaran yang berorientasi informasi yang lebih handal, (3) laporan kinerja belum menyampaikan laporan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan (4) hasil pengukuran capaian kinerja mulai dari tingkat eselon II, III, IV, dan staff belum dikaitkan dengan *reward* dan *punishment*.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Adapun faktor yang akan diuji adalah standar akuntansi pemerintahan, ketaatan pada peraturan perundangan dan kompetensi terhadap akuntabilitas kinerja.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang tertuang pada bagian latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini dapat diuraikan dalam bentuk pertanyaan - pertanyaan yang meliputi :

1. Apakah Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja?
2. Apakah Ketaatan Pada Peraturan Perundangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja?
3. Apakah Kompetensi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Kinerja.
2. Untuk mengetahui pengaruh Ketaatan Pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja.
3. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi terhadap Akuntabilitas Kinerja.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang berkualitas adalah penelitian yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembacanya ataupun yang berkecimpung dalam sektor akuntansi pemerintahan. Manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini yaitu:

##### **1. Manfaat Teoretis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai bahan referensi bagi pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menganalisis akuntabilitas kinerja pegawai instansi pemerintah. Serta dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman dan juga informasi tambahan yang dibutuhkan bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji masalah yang sama pada waktu mendatang.

##### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai sumbang saran dan bahan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mencapai akuntabilitas instansi pemerintah, Sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang memuaskan.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Landasan Teori

##### 2.1.1. Teori *Stakeholder*

Teori *Stakeholder* pertama kali di gagas oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984, yang menyatakan bahwa “*Stakeholder theory is a theory of organizational management and business ethics addresses morals and value in managing an organization*”. *Stakeholder theory* mengatakan bahwa kesuksesan dan hidup matinya suatu perusahaan sangat tergantung pada kemampuannya menyeimbangkan beragam kepentingan dari pada *Stakeholder* atau pemangku kepentingan (Lako, 2011). *Stakeholder* merupakan semua pihak, baik dari pihak internal dan pihak eksternal perusahaan yang memiliki suatu hubungan yang baik serta memberikan pengaruh ataupun yang di pengaruhi dan juga memiliki sifat langsung maupun tidak langsung (Shabira, 2019).

*Stakeholder theory* menekankan akuntabilitas organisasi jauh melebihi kinerja keuangan atau ekonomi sederhana. Teori ini menyatakan bahwa organisasi akan memilih secara sukarela mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial dan intelektual mereka, melebihi dan di atas permintaan wajibnya, untuk memenuhi ekspektasi sesungguhnya atau yang diakui oleh pemangku kepentingan (Rokhlinasari, 2016). *Stakeholder theory* mengasumsikan

bahwa eksistensi perusahaan memerlukan dukungan dan kepercayaan dari pemangku kepentingan, sehingga aktivitas perusahaan juga mempertimbangkan persetujuan dari pemangku kepentingan.

Salah satu cara untuk memenuhi keinginan pemangku kepentingan adalah dengan melakukan pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan merupakan salah satu cara untuk mengelola kepercayaan para pemangku kepentingan, dimana keberadaan pemangku kepentingan akan sangat mempengaruhi pola pikir dan persepsi manajemen terhadap *urgensi* praktik akuntansi entitas. Pemangku kepentingan dan organisasi saling mempengaruhi dari hubungan sosial keduanya dalam bentuk responsibilitas dan akuntabilitas yang diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan yang handal, relevan, tepat waktu dan dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan (Arifin, Handajani dan Alamsyah, 2016). Apabila laporan keuangan yang dilaporkan itu valid dan berkualitas, nantinya pemangku kepentingan dapat menggunakan informasi keuangan tersebut dalam proses pengambilan keputusan. Dapat dikatakan bahwa kinerja instansi tersebut baik dan akan berdampak pada meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut dan kepercayaan dari pemangku kepentingan.

### **2.1.2. Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi sektor publik secara tegas diidentikkan dengan penerapan dan perlakuan akuntansi di ruang publik. Ruang publik sendiri umumnya memiliki wilayah yang luas dan kompleks

dibandingkan dengan ruang privat/bisnis (Abdul Halim dan Syam kusufi, 2012) . Peranan akuntansi sektor publik diharapkan menawarkan jenis bantuan publik untuk mengatasi masalah publik. Akuntansi sektor publik adalah bidang akuntansi yang memiliki tingkat perusahaan tinggi negara dan kantor di bawahnya, legislatif di dekatnya, organisasi yang dimiliki negara bagian dan provinsi, perusahaan, kelompok ideologis, perguruan tinggi dan organisasi non profit lainnya (Bastian, 2013).

Motivasi di balik akuntansi di organisasi sektor publik adalah untuk memberikan data penting untuk secara tepat, efektif, dan moneter menangani suatu kegiatan dan bagian dari aset yang dibagikan dengan asosiasi, serta memberikan data untuk melaporkan kewajiban. tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan akibat tugas dan pemanfaatan kekayaan publik. Oleh karena itu, akuntansi sektor publik khawatir tentang memberikan data kepada pengendalian manajemen dan tanggung jawab akuntabilitas.

Pada dasarnya akuntabilitas adalah pengaturan data dan pengungkapan (*divulgence*) tentang latihan dan pelaksanaan keuangan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Otoritas publik, baik pusat maupun daerah, harus memiliki hak untuk menjadi subjek pemberi data terkait dengan pemenuhan kebebasan orang pada umumnya, khususnya opsi untuk mengetahui, opsi untuk diberi informasi, dan opsi untuk didengar aspirasinya.

Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas genap. Akuntabilitas vertikal adalah tanggung jawab kepada jabatan yang lebih penting, misalnya tanggung jawab kepala pemerintahan kepada pejabat/pimpinan balai kota. Akuntabilitas horisontal adalah tanggung jawab kepada populasi umum pada umumnya atau kepada berbagai instansi yang tidak memiliki hubungan atasan atau bawahan.

Komponen akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Akuntabilitas manajerial merupakan bagian utama untuk membuat keabsahan dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik. Ketidakmampuan untuk menyetujui pedoman tanggung jawab dapat memiliki konsekuensi yang luas. Jika publik percaya bahwa sektor publik tidak dapat didekati, masyarakat umum dapat meminta penyesuaian strategi, penggantian otoritas, dll. Tingkat tanggung jawab yang rendah juga meningkatkan peluang spekulasi dan mengurangi kapasitas untuk bersaing dan melakukan efektivitas.

### **2.1.3. Akuntabilitas Kinerja**

Menurut Surat Keputusan (SK) Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: “Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik”.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah komitmen untuk memberikan tanggung jawab atau menjawab dan memperjelas kinerja dan kegiatan orang/badan hukum/pimpinan organisasi kepada pihak-pihak yang berhak atau berwenang untuk meminta data atau tanggung jawab. Mengingat persetujuan ini, semua kantor administrasi, kantor dan organisasi negara baik di pusat dan legislatif provinsi berkewajiban untuk memberikan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah serta melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- b. Harus mempunyai suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- e. Harus jujur, objektif, transparan dan aktif sebagai bentuk perubahan manajemen instansi pemerintah dalam pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Akuntabilitas dibedakan dalam beberapa tipe. Menurut Abdul Halim dan Syam kusufi (2012) tipe dan jenis akuntabilitas dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu :

- a. Akuntabilitas internal, yaitu setiap pejabat atau pengurus publik baik individu maupun kelompok di dalam lingkungan internal pemerintahan yang secara hirarki berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan secara baik mengenai perkembangan kinerja.
- b. Akuntabilitas eksternal, yaitu setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

Dalam Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 disebutkan bahwa: “Tujuan dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk tercapainya pemerintahan yang baik”. Maka, berdasarkan Inpres tersebut dapat uraikan bahwa tujuan dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah sebagai berikut :

- a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
- c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

#### **2.1.4. Standar Akuntansi Pemerintahan**

Salah satu upaya konkret untuk mengakui transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan keuangan negara adalah penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang

sesuai dengan aturan yang tepat waktu dan siap pakai dengan mengikuti pedoman standar akuntansi pemerintah yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, standar akuntansi pemerintah yang kredibel ditetapkan melalui PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. “Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan diyakini akan berdampak kepada peningkatan kualitas laporan keuangan pada pemerintah pusat dan daerah yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel” dengan alasan bahwa standarisasi akuntansi pemerintahannya berbasis akrual.

Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi (Bastian, 2013), yaitu :

- a. Standar memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan, kinerja dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi.
- b. Standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara hati-hati dan independen saat menggunakan keahlian dan integritasnya dalam mengaudit laporan suatu organisasi serta saat membuktikan kewajaran.
- c. Standar memberikan petunjuk tentang data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, perencanaan dan regulasi ekonomi untuk peningkatan efisiensi ekonomi, serta tujuan sosial lainnya.
- d. Standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi.

Berdasarkan teori yang dijelaskan sebelumnya, maka tujuan penerapan standar akuntansi pemerintah dalam laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi keuangan yang

bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat suatu keputusan ekonomi, politik, dan sosial.

#### **2.1.5. Ketaatan Pada Peraturan Perundangan**

Jika penyelenggaraan akuntansi pemerintah sesuai dengan kualitas dan diharapkan dapat memenuhi tanggung jawab keuangan negara yang memadai, maka PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) memberikan aturan akuntansi pemerintah (*a manual for government accounting*) yang dapat memenuhi kebutuhan undang-undang dan peraturan perundangan. Secara logis, penyusunan teori akuntansi adalah siklus yang berurutan yang dimulai dengan perbaikan tujuan laporan anggaran dan penutupan dengan pengenalan struktur yang wajar atau sakral untuk digunakan sebagai pedoman strategi pembukuan. Menurut Belkaoui, mengacu pada sistem yang wajar pada lembar norma akuntansi moneter (FASB), ini adalah tugas yang paling nyata dan pembentukan konstitusi akuntansi. Konstitusi ini harus memperoleh pengakuan umum, menunjukkan perilaku agregat dan memastikan kepentingan publik di daerah yang terkena dampak pelaporan keuangan.

Dana negara yang diawasi dalam otoritas publik harus diwakili sesuai dengan perintah konstitusi. Pelaksanaan kapasitas ini di Indonesia diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 5 Dan Undang – Undang APBN. Kewenangan publik diperlukan untuk menjadikan pertanggungjawaban keuangan negara bagian dari tanggung jawab publik yang harus diteruskan oleh otoritas publik untuk penggunaan



rekening negara yang diperoleh dari dana individu dan dengan tujuan akhir kesejahteraan rakyat.

Peraturan adalah pedoman yang disusun yang dibentuk oleh lembaga negara atau otoritas yang disetujui dan memiliki kekuasaan yang membatasi. Motivasi di balik hukum dan pedoman negara adalah untuk mengelola dan mengajarkan setiap keberadaan negara dan negara. Dengan undang-undang atau pedoman, keberadaan negara dan negara menjadi lebih tepat. Ketaatan pada hukum dan peraturan perundangan adalah konsistensi individu dalam tunduk pada pedoman yang telah ditetapkan oleh lembaga negara atau otoritas yang disetujui dan memiliki kekuasaan membatasi untuk mengarahkan dan melatih setiap kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### **2.1.6. Kompetensi**

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 13 Tahun 2011 standar kompetensi jabatan yang selanjutnya disebut standar kompetensi manajerial adalah persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan. Sedangkan kompetensi manajerial adalah karakteristik yang mendasari individu dengan merujuk pada kriteria efektif dan/atau kinerja unggul dalam jabatan tertentu.

Menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 46A Tahun 2003, didefinisikan sebagai kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan,

keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatannya. Sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

## **2.2. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penerapan standar akuntansi pemerintah, ketaatan pada peraturan perundangan, kompetensi aparatur pemda dan motivasi kerja terhadap kinerja instansi pemerintah telah dilakukan, beberapa diantaranya ialah:

Sumiati (2012) melakukan penelitian tentang penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, akuntabilitas keuangan, ketaatan peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian Sumiati (2012) menunjukkan bahwa secara simultan penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, akuntabilitas keuangan dan ketaatan peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Secara parsial penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dan ketaatan peraturan perundangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap akuntabilitas kinerja sedangkan akuntabilitas keuangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

Afrina (2015) melakukan penelitian tentang penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pengendalian intern dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian Afrina (2015) menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pengendalian intern dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hafiz (2017) melakukan penelitian tentang Penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian Hafiz (2017) menunjukkan bahwa secara simultan penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. secara parsial variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan variabel kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Razi (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh ketaatan pada peraturan perundangan, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian akuntansi dan kompetensi aparatur pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian Fahrul Razi (2017) menunjukkan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian akuntansi dan kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

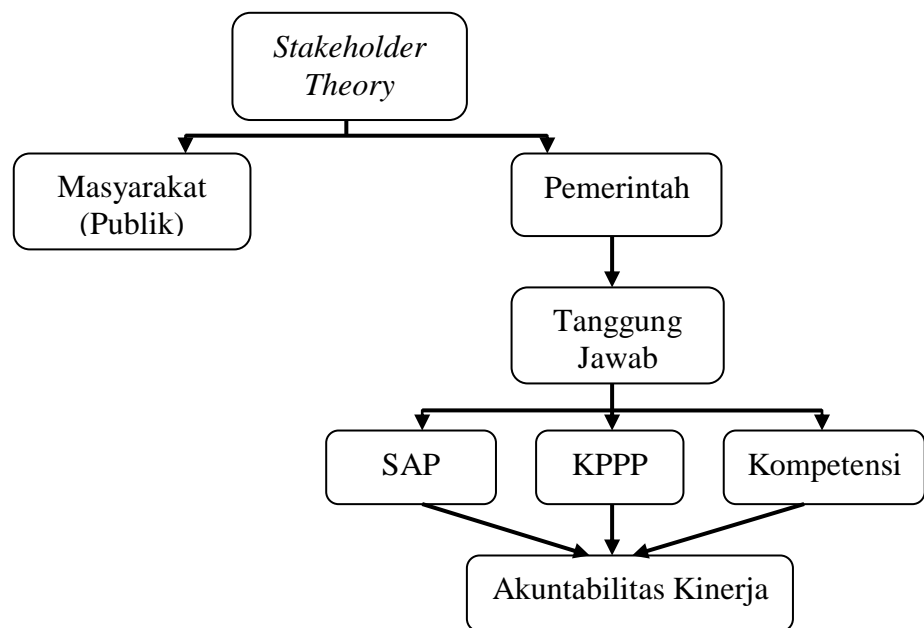
**Tabel 2.1.**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sumiati (2012)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Independen : penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, akuntabilitas keuangan, ketaatan peraturan perundangan</li> <li>- Dependen : Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah</li> </ul>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, akuntabilitas keuangan dan ketaatan peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Secara parsial penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dan ketaatan peraturan perundangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap akuntabilitas kinerja sedangkan akuntabilitas keuangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja</p>
2	Afrina (2015)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Independen : Penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pengendalian intern dan sistem pelaporan</li> <li>- Dependen : Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah</li> </ul>	<p>Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pengendalian intern dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah</p>
3	Hafiz (2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Independen : Penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas laporan keuangan</li> <li>- Dependen : Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah</li> </ul>	<p>Hasil penelitian menunjukan bahwa secara simultan penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara parsial variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan variabel kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p>
4	Razi (2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Independen : Ketaatan pada peraturan perundangan, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian akuntansi dan kompetensi aparatur pemerintah</li> <li>- Dependen : Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah</li> </ul>	<p>Hasil penelitian menunjukan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian akuntansi dan kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah</p>

Sumber : data olahan, 2022

### 2.3. Rerangka Konseptual

Rerangka konseptual dibangun untuk menjelaskan secara konseptual hubungan pengaruh setiap variabel dalam penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori dan penelitian terdahulu, rerangka konseptual penelitian ini digambarkan pada Gambar 2.1



**Gambar 2.1. Rerangka Konseptual**

*Sumber: Data olahan, 2022*

### 2.4. Pengembangan Hipotesis

#### 2.4.1. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Kinerja

Hipotesis ini dipengaruhi oleh teori *stakeholder*. Ketika standar akuntansi pemerintahan dapat diterapkan dengan baik oleh pegawai Organisasi Perangkat Daerah, hal itu akan berdampak pada meningkatnya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan sehingga pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan terstruktur sesuai dengan

pedoman yang ada dan dapat memberikan keyakinan yang memadai kepada *stakeholder*. Oleh karena itu, untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan diperlukan adanya penerapan standar akuntansi pemerintahan.

Berdasarkan PP No. 71 Tahun, 2010 disebutkan bahwa standar akuntansi pemerintahan merupakan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Laporan keuangan itu pada akhirnya dapat menjadi suatu informasi untuk mengukur dan menilai kinerja pemerintah daerah.

Menurut Jannaini, (2012) bahwa Standar Akuntansi Pemerintah dapat disimpulkan sebagai alat untuk memfasilitasi pelaporan yang semakin transparan dan akuntabel. Tujuan dari penerapan standar akuntansi pemerintahan adalah agar pelaksanaan pemerintahan berjalan terstruktur dan sesuai dengan pedoman yang ada sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Pujanira dan Taman, 2017). Laporan keuangan yang berkualitas akan memberikan keyakinan yang memadai kepada *stakeholder*.

Berdasarkan kutipan diatas bahwa informasi keuangan pemerintah akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas.

Sumiati, (2012) menyimpulkan bahwa Penerapan SAP berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja pada SKPD Kabupaten Siak. Jannaini (2012) menyimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Maka hipotesis yang diajukan adalah:

H1 : Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja

#### **2.4.2. Pengaruh Ketaatan Pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja**

Teori *stakeholder* menyatakan bahwa peraturan perundangan dapat dijadikan acuan dalam melakukan aktivitas untuk melayani masyarakat serta kewajiban terhadap pemerintah pusat agar terhindar dari penyimpangan yang akan merugikan pemerintah. Sasaran dan tujuan dari suatu organisasi dapat dicapai karena ketaatan pada peraturan perundangan akan mendorong kelancaran dari berjalannya suatu program. Dengan diterapkannya ketaatan pada peraturan perundangan, diharapkan kinerja dari pemerintah daerah yang baik dapat tercapai. Semakin taatnya aparatur pemerintah pada peraturan perundangan maka akan meminimalisir terjadinya kecurangan yang akan mendorong kelancaran berjalannya suatu program sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Sistem hukum yang berlaku di suatu negara tergantung pada sistem yang dianutnya, apakah negara yang bersangkutan menganut *civil law* atau *common law*. Dengan *civil law* maka segala sesuatu

aktivitas didasarkan pada peraturan perundangan, termasuk didalamnya aturan-aturan terkait dengan akuntansi terakumulasi dalam suatu perundangan dan aturan ini memiliki kecenderungan sangat terstruktur dan prosedural. Sebaliknya, *common law* segala kegiatan didasarkan kepada kesepakatan politik yang dikembangkan berdasarkan kasus demi kasus. Dalam sistem ini, membebaskan badan-badan pemerintah menggunakan standar apapun, yang penting berterima umum.

Menurut (Pertiwi & Utami, 2020) apabila aparat merasa ketaatan pada peraturan perundangan penting dilakukan karena dianggap menjadi faktor penentu tercapainya tujuan dan sasaran organisasi maka aparat tersebut akan lebih bertanggung jawab jika didukung dengan komitmen organisasi yang tinggi terhadap organisasinya. Semakin tinggi pemahaman aparat pemerintah terhadap pentingnya ketaatan pada peraturan perundangan, akan meningkatkan kinerja dari aparat pemerintah daerah sehingga dapat meminimalisir penyimpangan terhadap aturan yang berlaku serta mendorong kelancaran berjalannya suatu program.

Dalam penelitiannya, Sumiati, (2012) dan Fatmala (2014) membuktikan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Maka hipotesis yang diajukan adalah :

H2 : Ketaatan Pada Peraturan Perundangan berpengaruh positif



terhadap Akuntabilitas Kinerja

#### **2.4.3. Pengaruh Kompetensi terhadap Akuntabilitas Kinerja**

Mengacu pada teori *stakeholder* yang menerangkan bahwa *stakeholder* merupakan pihak yang dapat berpengaruh ataupun yang dapat dipengaruhi oleh suatu entitas maka akan memungkinkan bahwa sumber daya manusia yang merupakan pegawai pemerintah daerah sebagai *stakeholder* dapat memberikan dampak dan memperoleh dampak dari laporan akuntabilitas kinerja pemerintah. Ketika seseorang memiliki kompetensi atau kemahiran yang unggul maka dihasilkannya kinerja yang baik, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

(Sofyani dan Akbar, 2015) mengatakan bahwa aparatur pemerintah yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugas dan jabatan yang diemban akan lebih mampu menjalankan tugas dan implementasi akuntabilitas kinerja dibandingkan dengan aparatur yang tidak memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugas dan jabatan yang diemban. Apabila seorang aparatur pemerintah tidak memiliki kompetensi maka kinerjanya akan terhambat dan akan berdampak pada lingkungan sekitarnya.

Menurut Setiawan, dkk (2017) aparatur pemerintah yang memiliki kemampuan dan keahlian dibidangnya akan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan dan menghasilkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang maksimal.

Selain itu, informasi akuntabilitas kinerja yang dihasilkan tidak mengandung kesalahan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang transparan dan akuntabel. Maka hipotesis yang diajukan adalah :

H3 : Kompetensi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas  
Kinerja

#### **2.4.4. Pengaruh SAP, KPP dan Kompetensi terhadap Akuntabilitas Kinerja**

*Stakeholder Theory* menyatakan bahwa ketika pemangku kepentingan mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi organisasi, maka organisasi akan memberikan strategi yang memuaskan keinginan para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Oleh karena itu, laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja yang berkualitas merupakan salah satu cara untuk mengelola kepercayaan para *stakeholder*, dimana keberadaan pemangku kepentingan akan sangat mempengaruhi pola pikir dan persepsi manajemen terhadap urgensi praktik akuntansi organisasi. *Stakeholder* dan organisasi saling mempengaruhi dari hubungan sosial keduanya dalam bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas yang diwujudkan dengan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja yang handal, relevan, tepat waktu dan dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan. (Arifin et al, 2016)

Wardhana, (2015) dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), kinerja pemerintah akan dinilai

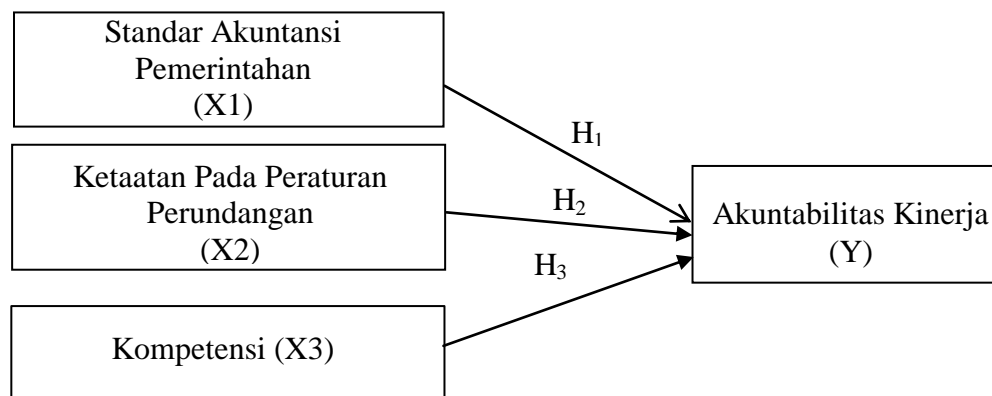
secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, LAKIP akan dapat mendorong pemerintah melaksanakan *good governance*, memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dengan pemerintah, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan terwujudnya akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu didukung oleh faktor aparatur pemerintah yang kompeten, ketaatan pada peraturan perundangan dan penerapan SAP. Hal ini diperlukan agar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tidak mengandung informasi yang salah, dapat dipercaya, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitiannya, Razi, (2017) dan Hafiz (2017) membuktikan bahwa standar akuntansi pemerintahan, ketaatan pada peraturan perundangan dan kompetensi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Maka hipotesis yang diajukan adalah :

H4 : SAP, KPP dan Kompetensi berpengaruh positif terhadap  
Akuntabilitas Kinerja

## 2.5. Model Penelitian

Dengan demikian model penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.2 Model Penelitian**

*Sumber: Data olahan, 2022*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei, data pokok dari sampel suatu populasi dikumpulkan dengan menggunakan instrument kuesioner di lapangan. Penelitian ini menggambarkan pengaruh standar akuntansi pemerintah, ketaatan pada peraturan perundangan dan kompetensi terhadap akuntabilitas kinerja.

#### **3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Definisi operasional dan Pengukuran Variabel penelitian menjelaskan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini terdiri dari satu variabel *dependen* dan tiga variabel *independen*, dan dijelaskan sebagai berikut :

##### **3.2.1 Variabel *Dependen***

Variabel *dependen* (terikat) merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Variabel *dependen* dalam penelitian ini yaitu akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran periodik (Instruksi Presiden RI No 7 Tahun 1999).

### 3.2.1.1 Akuntabilitas Kinerja (Y)

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mengukur variabel ini digunakan indikator berupa :

1. Akuntabilitas Kejujuran & Akuntabilitas Hukum, merupakan pelaporan untuk mengurangi tingkat ketidakpastian yang berkaitan dengan suatu masalah yang dihadapi pengambil keputusan.
2. Akuntabilitas Proses, merupakan pelaksanaan kegiatan yang ditentukan dengan menggunakan proses, prosedur dan ukuran-ukuran.
3. Akuntabilitas Pelaksanaan, merupakan pengamatan untuk melihat apakah kegiatan yang dilakukan sudah efisien dan efektif.
4. Akuntabilitas Program, merupakan penetapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
5. Akuntabilitas Kebijakan, merupakan pemilihan berbagai kebijakan yang akan diterapkan.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah komitmen untuk memberikan tanggung jawab atau menjawab dan memperjelas kinerja dan kegiatan orang/badan hukum/pimpinan organisasi kepada pihak-pihak yang berhak atau berwenang untuk meminta data atau tanggung jawab. Mengingat persetujuan ini, semua kantor administrasi, kantor dan organisasi negara baik di pusat dan legislatif provinsi berkewajiban untuk memberikan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Tujuan dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk tercapainya pemerintahan yang baik.

Variabel ini diukur dengan menggunakan kuesioner yang diadaptasi dari kuesioner Hafiz, (2017) dengan jumlah item pertanyaan adalah 6 item dengan skala ukur 10 (sepuluh) poin. Ukuran jawaban dimulai dari “sangat tidak setuju” sampai dengan “sangat setuju” yang terdiri dari:

- Angka 1-5 : Cenderung tidak setuju
- Angka 6-10 : Cenderung setuju

### **3.2.2 Variabel bebas (*independent*)**

variabel yang memengaruhi atau menjadi penyebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2017). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah variabel *independen* standar akuntansi pemerintahan (X1), ketaatan pada peraturan perundangan (X2), dan kompetensi (X3). Variabel terikat (*dependent*) adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2017). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah akuntabilitas kinerja (Y).

#### **3.2.2.1 Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)**

Penerapan standar akuntansi pemerintah (X1) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Fatmala, (2014).

Salah satu upaya konkret untuk mengakui transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan keuangan negara adalah penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang sesuai dengan aturan yang tepat waktu dan siap pakai dengan mengikuti pedoman standar akuntansi pemerintah yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Indikator Pengukuran Penerapan standar akuntansi pemerintah adalah :

1. Kesesuaian sistem akuntansi keuangan yang digunakan sudah memenuhi standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang berbasis akrual.
2. Prosedur pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan standar pencatatan akuntansi pada umumnya.

Variabel ini diukur dengan menggunakan kuesioner yang diadaptasi dari kuesioner Hafiz, (2017) dengan jumlah item pernyataan 10 item dengan skala ukur 10 (sepuluh) poin.

#### **3.2.2.2 Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X2)**

Ketaatan pada peraturan perundangan adalah kepatuhan seseorang dalam menaati peraturan yang telah dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat berwenang dan mempunyai kekuatan untuk mengikat agar dapat mengatur dan menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara.



Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mengacu pada penyusunan laporan keuangan; pemerintah harus memenuhi persyaratan minimal yang ditentukan dalam standar akuntansi pemerintahan. Sebagai negara hukum, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan bentuk kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang untuk dipatuhi oleh seluruh warga negara dan secara nasional. Dengan landasan hukum tersebut, diharapkan setiap aparatur pemerintah harus konsisten dan patuh dalam menjalankan tugas dan kewajibannya guna mewujudkan pemerintahan yang berkinerja baik. Oleh karena itu, pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan harus mematuhi standar akuntansi pemerintahan. Pebrianti, S., & Aziza, N. (2018).

Sistem hukum yang berlaku di suatu negara tergantung pada sistem yang dianutnya, apakah negara yang bersangkutan menganut *civil law* atau *common law*. Dengan *civil law* maka segala sesuatu aktivitas didasarkan pada peraturan perundangan, termasuk didalamnya aturan-aturan terkait dengan akuntansi terakumulasi dalam suatu perundangan dan aturan ini memiliki kecenderungan sangat terstruktur dan prosedural. Sebaliknya, *common law* segala kegiatan didasarkan kepada kesepakatan politik yang dikembangkan berdasarkan kasus demi kasus. Dalam sistem ini, membebaskan

badan-badan pemerintah menggunakan standar apapun, yang penting berterima umum.

Pada variabel ketaatan pada peraturan perundangan diukur dengan 5 butir pernyataan yang telah digunakan dalam penelitian Fatmala (2014). Untuk mengukur variabel ini menggunakan skala ukur 10 (sepuluh) poin.

### **3.2.2.3 Kompetensi (X3)**

Kompetensi aparatur pemerintah daerah didefinisikan sebagai kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan jabatannya di instansi pemerintah. Dewi, R., & Hoesada, J. (2020).

Aparatur pemerintah yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugas dan jabatan yang diemban akan lebih mampu menjalankan tugas dan implementasi akuntabilitas kinerja dibandingkan dengan aparatur yang tidak memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugas dan jabatan yang diemban. Apabila seorang aparatur pemerintah tidak memiliki kompetensi maka kinerjanya akan terhambat dan akan berdampak pada lingkungan sekitarnya.

Kompetensi aparatur pemerintah memungkinkan untuk tercapainya suatu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang efektif. Sesuai dengan prinsip pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah yang kedua yaitu berdasarkan sistem yang bisa mempertanggungjawabkan aplikasi sumber daya secara terus menerus dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Septiani, dkk 2020). Variabel ini diukur dengan menggunakan instrument yang dikembangkan oleh Ni Made, (2015) dengan jumlah item pernyataan 6 item dengan skala ukur 10 (sepuluh) poin.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.

Data primer, yaitu jenis data ini diperoleh dari penelitian lapangan dan pengamatan secara langsung dari sumber atau objek penelitian dengan metode kuesioner.

Data sekunder, yaitu jenis data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, dari studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari literatur-literatur serta dari sumber lain yang berhubungan dan relevan dengan masalah-masalah yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini data diperoleh dengan cara menyebarkan kuisisioner pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

### 3.4 Populasi dan Sampel

Menurut Gani dan Amalia (2015) populasi adalah sekelompok atau kumpulan elemen yang lengkap. Dalam penelitian ini penulis mengambil populasi penelitian pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Total populasi dalam penelitian ini sebanyak 37 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 42 orang aparatur pengurus pemerintahan pada 37 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pemilihan sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan metode sampling sederhana, dimana teknik pengambilan sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian. Sumber data dari penelitian ini adalah pegawai pengelola keuangan OPD Kabupaten Kutai Kartanegara yang masing-masing mewakili OPD.

Adapun kriteria pengambilan sampel ialah: 1) Kepala OPD di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2) Kepala Bagian Keuangan di Kabupaten Kutai Kartanegara, 3) Kepala Sub Bagian Keuangan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Alasan pemilihan setiap kepala bagian OPD sebagai responden dikarenakan setiap kepala bagian OPD terlibat secara langsung dan bertanggung jawab penuh dalam menghasilkan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### **3.5 Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode survei yang dilakukan pada OPD yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam penelitian ini, data yang digunakan untuk mengumpulkan data primer ini adalah melalui daftar pertanyaan yang disebut kuesioner yang disebar langsung ke pegawai OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bagian pengelola keuangan. Media kuesioner akan memberikan beberapa pilihan jawaban alternatif yang sesuai dengan proporsi dari masing-masing pernyataan.

### **3.6 Alat Analisis dan Pengujian Hipotesis**

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linear Berganda dengan *software Ibm SPSS 25*, yang menggambarkan suatu hubungan dimana satu atau lebih variabel (*variabel independen*) mempengaruhi variabel lainnya (*variabel dependen*). Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pengujian kualitas data dengan uji reliabilitas dan validitas serta uji asumsi klasik (meliputi uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas).

#### **3.6.1. Uji Kualitas Data**

##### **3.6.1.1. Uji Validitas**

Uji validitas menurut (Sugiyono, 2012), Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Pengujian ini

menggunakan metode *Pearson Corelation*, data dikatakan valid apabila korelasi antar skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor setiap konstruknya signifikan pada level 0,05 (Ghozali, 2016)

### **3.6.1.2. Uji Reliabilitas**

Untuk uji reliabilitas instrumen, semakin dekat koefisien keandalan, maka akan semakin baik. Keandalan konsistensi antar item atau koefisien dapat dilihat pada table *Cronbach's Alpha*. Untuk menguji reabilitas instrument, semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 maka akan semakin baik. Nilai reabilitas dinyatakan *reliable* jika mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* dari masing-masing instrument yang dikatakan valid jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,6. (Ghozali, 2016)

### **3.6.2. Uji Asumsi Klasik**

#### **3.6.2.1. Uji Normalitas**

Menurut (Ghozali, 2016) uji normalitas merupakan pengujian asumsi residual yang berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah dimana model yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas akan terpenuhi apabila sampel yang digunakan lebih dari 30, untuk mengetahui normalitas distribusi data dapat dilakukan dengan menggunakan analisis statistik, yaitu *Kolmogrov-Smirnov test* dengan kriteria pengujian  $\alpha$  0,05 sebagai berikut:

- a. Jika  $sig \geq \alpha$  berarti data sampel yang diambil terdistribusi normal
- b. Jika  $sig \leq \alpha$  berarti data sampel yang diambil tidak terdistribusi normal

### 3.6.2.2. Uji Multikolinearitas

Asumsi ini menyatakan bahwa antara variabel independen tidak terdapat gejala korelasi. Menurut Ghozali (2016) pengujian Multikolinieritas akan menggunakan *Variance Inflation factor* (VIF) dengan kriteria yaitu:

1. Jika angka *tolerance* dibawah 0,10 dan  $VIF > 10$  dikatakan terdapat gejala multikolinieritas
2. Jika angka *tolerance* diatas angka 0,10 dan  $VIF < 10$  dikatakan tidak terdapat gejala multikolinieritas.

### 3.6.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan *Glejser Test*. Pengujian ini membandingkan signifikan dari uji ini apabila hasilnya  $sig > 0,05$  atau 5%. Jika signifikan di atas 5% maka disimpulkan model regresi tidak mengandung

adanya heteroskedastisitas. (Ghozali, 2016)

### 3.6.3. Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis digunakan alat analisis regresi berganda (*multiple regression*). Uji hipotesis tersebut dilakukan dengan software SPSS 25 karena mampu menghasilkan output yang meyakinkan untuk dianalisis lebih lanjut. Untuk itu diformulasikan model regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

dimana :

Y	= Akuntabilitas kinerja
$\alpha$	= konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= koefisien regresi
X1	= Standar akuntansi pemerintahan
X2	= Ketaatan Pada Peraturan Perundangan
X3	= Kompetensi
$\varepsilon$	= standar error

#### 3.6.3.1. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Derajat signifikansi yang digunakan adalah 5% (0,05). Jika nilai probabilitas < 0,05, maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Namun, jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. (Ghozali, 2016)



### 3.6.3.2. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. Derajat signifikan yang digunakan adalah signifikansi  $< 0,05$ , maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Namun, jika probabilitas nilai t atau signifikansi  $> 0,05$ , maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. (Ghozali, 2016)

### 3.6.3.3. Uji Koefisien Determinasi

Nilai  $AdjustedR^2$  ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X. Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 ( $AdjustedR^2 = 0$ ), artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila  $AdjustedR^2 = 1$ , artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X. Dengan kata lain bila  $AdjustedR^2 = 1$ , maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi. (Ghozali, 2016)

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh melalui media kuesioner yang dibagikan kepada Kepala OPD, Kabbag Keuangan dan Kasubbag Keuangan di Kabupaten Kutai Kartanegara melalui media online (*google form*), dan diperoleh sebanyak 44 kuesioner yang kembali dari kuesioner yang disebar. Dari 44 kuesioner yang kembali tersebut terdapat 2 kuesioner yang pengisiannya tidak lengkap sehingga jumlah kuesioner yang dapat diolah adalah sebanyak 42 kuesioner.

Adapun perhitungan data kuesioner disajikan dalam tabel 4.1

**Tabel 4.1**  
**Data Kuesioner**

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang disebar secara online	Tidak terdeteksi	-
Kuesioner yang kembali	44	100%
Kuesioner yang tidak dapat digunakan	2	4.55%
Kuesioner yang dapat digunakan	42	95.5%

*Sumber : data olahan, 2022*

##### 4.1.1 Karakteristik Responden

Karakteristik responden digunakan untuk menggambarkan secara umum terkait usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, latarbelakang pendidikan dan jabatan dari keseluruhan responden yang telah mengisi

kuesioner. Total kuesioner yang kembali dan dapat diolah oleh peneliti adalah sebanyak 42 kuesioner. Responden pada penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di OPD Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut merupakan gambaran umum terkait jenis kelamin, pendidikan terakhir dan latarbelakang pendidikan responden yang telah peneliti kelompokkan:

#### 4.1.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Berikut merupakan karakteristik responden berdasarkan usia:

**Tabel 4.2**  
**Usia Responden**

No.	Usia	Jumlah	Persentase (%)
1.	< 20 Tahun	-	-
2.	20-30 Tahun	-	-
3.	31-40 Tahun	5	11,9%
4.	41-50 Tahun	17	40,5%
5.	> 50 Tahun	20	47,6%
	<b>TOTAL</b>	<b>42</b>	<b>100%</b>

*Sumber : data olahan, 2022*

Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden dengan usia 31-40 tahun berjumlah sebanyak 5 orang atau sebesar 11,9%. Responden dengan usia 41-50 tahun berjumlah sebanyak 17 orang atau sebesar 40,5%. Sedangkan reponden dengan usia > 50 tahun berjumlah sebanyak 20 orang atau sebesar 47,7%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini didominasi oleh responden dengan usia > 50 tahun dengan jumlah 40 orang atau 47,7% dari keseluruhan responden.

#### 4.1.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut merupakan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin:

**Tabel 4.3**  
**Jenis Kelamin Responden**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	33	78,5%
2.	Perempuan	9	21,5%
	<b>TOTAL</b>	<b>42</b>	<b>100%</b>

*Sumber : data olahan, 2022*

Dari tabel 4.3 dapat diketahui bahwa responden laki-laki berjumlah sebanyak 33 orang atau sebesar 78,5% dan responden perempuan berjumlah sebanyak 9 orang atau sebesar 21,5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini didominasi oleh responden dengan jenis kelamin laki-laki dengan jumlah 33 orang atau 78,5% dari keseluruhan responden.

#### 4.1.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berikut merupakan karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir:

**Tabel 4.4**  
**Pendidikan Terakhir Responden**

No.	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	SMA/SMK (SLTA)	1	2,2%
2.	Sarjana (S1)	15	36,2%
3.	Magister (S2)	22	52,5%
4.	Doktor (S3)	4	9,1%
	<b>TOTAL</b>	<b>42</b>	<b>100%</b>

*Sumber : data olahan, 2022*

Dari tabel 4.4 dapat diketahui bahwa responden dengan pendidikan SLTA berjumlah sebanyak 1 orang atau sebesar 2,2%. Responden dengan pendidikan S1 berjumlah sebanyak 16 orang atau sebesar 36,2%. Responden dengan pendidikan S2 berjumlah sebanyak 23 orang atau sebesar 52,5%. Sedangkan responden dengan pendidikan S3 berjumlah sebanyak 4 orang atau sebesar 9,1%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini didominasi oleh responden dengan pendidikan S2 dengan jumlah 23 orang atau 52,5% dari keseluruhan responden.

#### 4.1.1.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Berikut merupakan karakteristik responden berdasarkan latar belakang pendidikan:

**Tabel 4.5**  
**Latar Belakang Pendidikan Responden**

No.	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Ekonomi	17	40,5%
2.	Sosial	6	14,3%
3.	Hukum	2	4,8%
4.	Ilmu Pemerintahan	1	2,3%
5.	Lainnya	16	38,1%
	<b>TOTAL</b>	<b>42</b>	<b>100%</b>

*Sumber : data olahan, 2022*

Dari tabel 4.5 dapat diketahui bahwa responden dengan latar belakang pendidikan ekonomi berjumlah sebanyak 17 orang atau sebesar 40,5%. Responden dengan latar belakang pendidikan sosial berjumlah sebanyak 6 orang atau sebesar 14,3%. Responden dengan

latar belakang pendidikan hukum berjumlah sebanyak 2 orang atau sebesar 4,8%. Responden dengan latar belakang pendidikan ilmu pemerintahan berjumlah sebanyak 1 orang atau sebesar 2,3%. Sedangkan responden dengan latar belakang pendidikan lainnya berjumlah sebanyak 16 orang atau sebesar 38,1%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini didominasi oleh responden dengan latar belakang pendidikan ekonomi dengan jumlah 17 orang atau 40,5% dari keseluruhan responden.

#### 4.1.1.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Berikut merupakan karakteristik responden berdasarkan jabatan:

**Tabel 4.6**  
**Jabatan Responden**

No.	Jabatan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Kepala Dinas/Badan	18	43%
2.	Kabbag Keuangan	12	28,5%
3.	Kasubbag Keuangan	12	28,5%
	<b>TOTAL</b>	<b>42</b>	<b>100%</b>

*Sumber : data olahan, 2022*

Dari tabel 4.6 dapat diketahui bahwa responden dengan jabatan kepala dinas/badan berjumlah sebanyak 18 orang atau sebesar 43%. Responden dengan jabatan kabbag keuangan berjumlah sebanyak 12 orang atau sebesar 28,5%. Sedangkan responden dengan jabatan kasubbag keuangan berjumlah sebanyak 12 orang atau sebesar 28,5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini didominasi

oleh responden dengan jabatan kepala dinas/badan dengan jumlah 18 orang atau 43% dari keseluruhan responden.

#### 4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif

**Tabel 4.7**  
**Analisis Statistik Deskriptif**

<b>Descriptive Statistics</b>					
	<b>N</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>
Standar Akuntansi Pemerintahan	42	34	50	41.76	3.553
Ketaatan Pada Peraturan Perundangan	42	20	25	21.62	1.710
Kompetensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	42	16	30	24.21	2.543
	42	21	30	24.76	1.897
Valid N (listwise)	42				

*Sumber : data olahan SPSS 25, 2022*

Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat dilihat deskripsi variabel penelitian dari mean, standar deviasi, minimum dan maksimum dari masing-masing variabel. maka kesimpulan yang dapat dijelaskan dari statistik deskriptif ialah sebagai berikut ini :

1. Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) pada tabel 4.7 di atas, dengan jumlah N sebanyak 42 responden memiliki nilai rata-rata sebesar 24.76 mendekati nilai maksimum yang menunjukkan bahwa variabel Y memiliki nilai yang baik. Sedangkan nilai Standar deviasi sebesar 1.897, lebih kecil dari nilai

mean 24.76. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat persebaran data pada variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi adalah rendah.

2. Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) pada tabel 4.7 di atas, dengan jumlah N sebanyak 42 responden memiliki nilai rata-rata sebesar 24.76 mendekati nilai maksimum yang menunjukkan bahwa variabel Y memiliki nilai yang baik. Sedangkan nilai Standar deviasi sebesar 1.897, lebih kecil dari nilai mean 24.76. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat persebaran data pada variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi adalah rendah.
3. Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) pada tabel 4.7 di atas, dengan jumlah N sebanyak 42 responden memiliki nilai rata-rata sebesar 41.76 mendekati nilai maksimum yang menunjukkan bahwa variabel X1 memiliki nilai yang baik. Sedangkan nilai Standar deviasi sebesar 3.553, lebih kecil dari nilai mean 41.76. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat persebaran data pada variabel Standar Akuntansi Pemerintahan adalah rendah.
4. Variabel Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X2) pada tabel 4.7 di atas, dengan jumlah N sebanyak 42 responden memiliki nilai rata-rata sebesar 21.62 mendekati nilai maksimum yang menunjukkan bahwa variabel X2 memiliki nilai yang baik. Sedangkan nilai Standar deviasi sebesar 1.710, lebih kecil dari nilai mean 21.62. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat persebaran data pada variabel Ketaatan Pada Peraturan Perundangan adalah rendah.



5. Variabel Kompetensi (X3) pada tabel 4.7 di atas, dengan jumlah N sebanyak 42 responden memiliki nilai rata-rata sebesar 24.21 mendekati nilai maksimum yang menunjukkan bahwa variabel X3 memiliki nilai yang baik, sedangkan nilai Standar deviasi sebesar 2.543, lebih kecil dari nilai mean 24.21. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat persebaran data pada variabel Kompetensi adalah rendah.

#### 4.1.3 Hasil Uji Kualitas Data

##### 4.1.3.1 Hasil Uji Validitas

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	No. Item Pertanyaan	$r_{\text{tabel}}$ (n=42)	$r_{\text{hitung}}$	Keterangan
Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)	1	0.312	0.809	Valid
	2	0.312	0.596	Valid
	3	0.312	0.7	Valid
	4	0.312	0.783	Valid
	5	0.312	0.724	Valid
	6	0.312	0.734	Valid
	7	0.312	0.542	Valid
	8	0.312	0.546	Valid
	9	0.312	0.538	Valid
	10	0.312	0.644	Valid
Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X2)	1	0.312	0.728	Valid
	2	0.312	0.660	Valid
	3	0.312	0.755	Valid
	4	0.312	0.788	Valid
	5	0.312	0.821	Valid
Kompetensi (X3)	1	0.312	0.882	Valid
	2	0.312	0.867	Valid
	3	0.312	0.588	Valid
	4	0.312	0.793	Valid
	5	0.312	0.563	Valid
	6	0.312	0.561	Valid
Akuntabilitas Kinerja (Y)	1	0.312	0.647	Valid
	2	0.312	0.870	Valid
	3	0.312	0.840	Valid
	4	0.312	0.914	Valid
	5	0.312	0.902	Valid
	6	0.312	0.694	Valid

Sumber : data olahan 2022

Berdasarkan tabel 4.8 hasil uji validitas di atas, dapat diketahui seluruh item pertanyaan dalam variabel bersifat valid. Ketentuan Validitas suatu item pertanyaan adalah dengan membandingkan  $r$  hitung (*pearson correlation*) dengan  $r$  tabel (signifikansi 0.05). Jika  $r$  hitung  $\geq r$  tabel, maka item dinyatakan valid. Diketahui jumlah responden (N) dalam penelitian adalah 42 responden, dan  $df = n - 2 = 40$ , maka nilai  $r$  tabel adalah 0.312. *Output* hasil uji validitas di atas menunjukkan bahwa keseluruhan item pertanyaan dinyatakan valid dan layak untuk digunakan.

#### 4.1.3.2 Hasil Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas merupakan kelanjutan dari uji validitas, dimana item pertanyaan yang dimasukkan dalam pengujian adalah item yang valid saja. Instrument dalam penelitian ini menggunakan teknik *Cronbach alpha* ( $\alpha$ ) dimana Nilai Reliabilitas dinyatakan *Reliable* jika masing-masing instrument variabel memiliki nilai *Cronbach alpha* ( $\alpha$ )  $\geq 0.6$  (Ghozali, 2016). Hasil uji reliabilitas yang disajikan pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai *Cronbach alpha* ( $\alpha$ )  $> 0.6$ , dengan demikian dapat disimpulkan masing-masing variabel adalah *Reliable*.

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach Alpha
Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)	0.853
Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X2)	0.799
Kompetensi (X3)	0.791
Akuntabilitas Kinerja (Y)	0.897

*Sumber : data olahan, 2022*

#### 4.1.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

##### 4.1.4.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas data merupakan hal penting karena dengan data yang terdistribusi normal, maka data tersebut dianggap dapat mewakili populasi. Untuk mengambil keputusan data terdistribusi normal atau tidak, maka dapat dilihat dari nilai signifikansi (*Asymp Sig 2-tailed*). Jika signifikansi kurang atau lebih kecil dari 0.05, maka data tidak berdistribusi dengan normal. Namun jika signifikansi lebih besar dari 0.05, maka data berdistribusi dengan normal. Penelitian ini, menggunakan uji normalitas dengan metode *One Sample Kolmogorov-Smirnov*.

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Normalitas**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		Unstandardized Residual
N		42
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.90950389
Most Extreme Differences	Absolute	.097
	Positive	.080
	Negative	-.097
Test Statistic		.097
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : data olahan SPSS 25, 2022

Berdasarkan tabel 4.10 hasil uji normalitas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (*Asymp Sig 2-tailed*) sebesar 0.200 lebih besar dari nilai signifikansi 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini terdistribusi normal.

#### 4.1.4.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebasnya. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*, apabila nilai VIF < 10 dan *tolerance* > 0.1, maka tidak terjadi gejala multikoliniearitas (Ghozali, 2016). Hasil uji multikolinearitas disajikan pada tabel 4.11.

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)	0,735	1,361
	Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X2)	0,814	1,228
	Kompetensi (X3)	0,889	1,125

*Sumber : data olahan, 2022*

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.11. Diketahui bahwa nilai VIF < 10 dan nilai *Tolerance* > 0.1, maka dapat

disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen.

#### 4.1.4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *Glejser Test*. Uji *Glejser* dilakukan dengan meregresikan variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Kondisi heteroskedastisitas terjadi jika terdapat pengaruh yang signifikan (0.05) dari Standar Akuntansi Pemerintahan, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan dan Kompetensi terhadap absolut residualnya. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan pada tabel 4.12.

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	3.605	3.356		1.074	.290
Standar Akuntansi Pemerintahan	-.023	.061	-.068	-.383	.704
Ketaatan Pada Peraturan Perundangan	-.053	.127	-.075	-.421	.676
Kompetensi	.000	.030	-.002	-.011	.991

a. Dependent Variable: Abs\_RES

Sumber : data olahan SPSS 25, 2022

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas pada tabel 4.12. Dapat diketahui bahwa nilai signifikansi ketiga variabel independen lebih besar dari 0.05. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

#### 4.1.5 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh hubungan variabel independen yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan dan Kompetensi terhadap variabel dependen yaitu Akuntabilitas Kinerja. Pengujian analisis regresi linear berganda pada penelitian ini dilakukan melalui program *SPSS* versi 25. Hasil analisis regresi linear berganda disajikan pada tabel 4.13.

**Tabel 4.13**  
**Analisis Regresi Linear Berganda**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	8.888	4.067		2.186	.035		
Standar Akuntansi Pemerintahan	.112	.085	.209	1.316	.196	.735	1.361
Ketaatan Pada Peraturan Perundangan	.420	.167	.378	2.509	.017	.814	1.228
Kompetensi	.088	.108	.118	.820	.417	.889	1.125

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber : data olahan SPSS 25, 2022

## 4.1.6 Hasil Uji Hipotesis

### 4.1.6.1 Hasil Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas pada saat yang sama secara signifikan mempengaruhi variabel terikat. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5% (0,05). Dalam hal jika nilai probabilitas  $< 0,05$ , dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Namun jika asumsi nilai signifikansi  $> 0,05$  maka tidak ada pengaruh yang besar secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. (Ghozali, 2016)

**Tabel 4.14**  
**Hasil Uji F**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	55.206	3	18.402	5.214	.004 <sup>b</sup>
	Residual	134.127	38	3.530		
	Total	189.333	41			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

b. Predictors: (Constant), Standar Akuntansi Pemerintahan, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan, Kompetensi

*Sumber : data olahan SPSS 25, 2022*

Berdasarkan tabel 4.14, diketahui bahwa nilai  $F_{hitung}$  adalah 5.214, dengan nilai  $F_{tabel}$  sebesar 2.845 sehingga  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dengan nilai signifikansi 0.004 lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

#### 4.1.6.2 Hasil Uji T

Uji-t digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara parsial memiliki pengaruh atau tidak pada variabel terikat. Tingkat signifikan yang digunakan adalah signifikansi  $< 0,05$ , sehingga dapat dikatakan bahwa ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Meskipun demikian, jika probabilitas nilai t atau signifikansi  $> 0,05$ , dapat dikatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat. (Ghozali, 2016)

**Tabel 4.15**  
**Hasil Uji T**

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	15.474	8.475		1.826	.076
Standar Akuntansi Pemerintahan	.178	.073	.341	2.444	.019
Ketaatan Pada Peraturan Perundangan	.420	.167	.378	2.509	.017
Kompetensi	.472	.196	.375	2.409	.021

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber : data olahan SPSS 25, 2022

Berdasarkan tabel 4.15 dapat dijelaskan hasil uji t dari masing-masing variabel bebas, sebagai berikut:

1. Diketahui nilai signifikansi pada variabel Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebesar 0.019 lebih kecil dari 0.05, maka  $H_a$  terbukti dan  $H_0$  tidak terbukti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa



Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat penerapan standar akuntansi pemerintah secara signifikan mempengaruhi semakin tingginya tingkat akuntabilitas kinerja pegawai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Diketahui nilai signifikansi pada variabel Ketaatan Pada Peraturan Perundangan adalah sebesar 0.017 lebih kecil dari 0.05, maka  $H_a$  terbukti dan  $H_o$  tidak terbukti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ketaatan Pada Peraturan Perundangan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa Ketaatan Pada Peraturan Perundangan secara signifikan mempengaruhi tingkat akuntabilitas kinerja pegawai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Diketahui nilai signifikansi pada variabel Kompetensi adalah sebesar 0.021 lebih kecil dari 0.05, maka  $H_a$  terbukti dan  $H_o$  tidak terbukti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi aparatur pemerintah secara signifikan juga mempengaruhi tingkat akuntabilitas kinerja pegawai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

### 4.1.6.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 4.16**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

<b>Model Summary</b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.972 <sup>a</sup>	.945	.941	.681

a. Predictors: (Constant), Kompetensi, Standar Akuntansi Pemerintahan, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan

*Sumber : data olahan SPSS 25, 2022*

Berdasarkan tabel 4.16 nilai *adjusted R square* adalah sebesar 0.941 atau 94.1%. hal ini menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 94.1%.

## 4.2 Pembahasan

### 4.2.1 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan hasil uji parsial (t) pada tabel 4.15 diperoleh nilai signifikansi variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) sebesar  $0.019 < 0.05$ , maka hipotesis yang diajukan terbukti. Hal ini menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Semakin baik Standar Akuntansi Pemerintah yang diterapkan para aparatur pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara maka akan semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas kinerja pegawai instansi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pada proses penyiapan laporan keuangan instansi pemerintah daerah diperlukan pengetahuan akuntansi yang memadai atas standar akuntansi pemerintahan yang akan menghasilkan suatu laporan keuangan yang berkualitas. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sangat penting untuk diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan daerah, karena standar akuntansi pemerintah merupakan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan yang akan mengatur penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, terpercaya, dapat dimengerti dan tidak menyesatkan. Dengan laporan keuangan yang berkualitas maka akan semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas kinerja pada suatu instansi pemerintah.

Tujuan diterapkannya Standar Akuntansi Pemerintahan pada lingkungan pemerintah daerah adalah untuk mewujudkan fungsi analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan daerah yang pada akhirnya laporan keuangan itu dapat menjadi suatu informasi untuk mengukur dan menilai kinerja instansi pemerintah dalam rangka menggambarkan keberhasilan maupun kegagalan kinerja pemerintah daerah. Maka, dengan adanya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang baik, dapat membantu pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mewujudkan akuntabilitas kerjanya.

Hasil penelitian pada pengujian hipotesis pertama memberikan bukti bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pegawai Instansi Pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dan berhasil mendukung penelitian yang dilakukan Afrina (2015), Zulrahman (2015) serta Fatmala (2014) yang berhasil membuktikan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan akan berpengaruh signifikan terhadap semakin tingginya Akuntabilitas Kinerja Pegawai Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

#### **4.2.2 Pengaruh Ketaatan Pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja**

Berdasarkan hasil uji parsial (t) pada tabel 4.15 diperoleh nilai signifikansi variabel Ketaatan Pada Peraturan Perundangan ( $X_2$ ) sebesar  $0.017 < 0.05$ , maka hipotesis yang diajukan terbukti. Hal ini menunjukkan bahwa Ketaatan Pada Peraturan Perundangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pegawai instansi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Jika para aparat pemerintahan memiliki ketaatan dan pemahaman yang baik terhadap peraturan perundangan yang telah berlaku, maka akan berpengaruh terhadap tingginya tingkat akuntabilitas kinerja pegawai instansi pemerintah.

Sistem hukum yang berlaku di suatu negara bergantung pada sistem yang dianutnya, apakah negara yang bersangkutan menganut

*civil law* atau *common law*. Sistem hukum yang dianut dalam sistem akuntansi sektor publik adalah sistem *civil law*, yang berarti setiap standar peraturan yang berhubungan dengan akuntansi sektor publik dimuat dalam bentuk peraturan perundangan-undangan. Aparatur instansi pemerintah diwajibkan untuk mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Ketaatan pada peraturan perundangan akan mendorong kelancaran program sehingga tercapai tujuan atau sasaran yang diinginkan yang akan meningkatkan tingkat akuntabilitas kinerja pegawai instansi pemerintah.

Hasil penelitian pada pengujian hipotesis kedua memberikan bukti bahwa Ketaatan Pada Peraturan Perundangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pegawai Instansi Pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dan berhasil mendukung penelitian yang dilakukan Lumenta, dkk (2016), Sumiati (2012) dan Fatmala (2014) yang berhasil membuktikan bahwa Ketaatan Pada Peraturan Perundangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepatuhan terhadap Ketaatan Pada Peraturan Perundangan akan berpengaruh signifikan terhadap semakin tingginya Akuntabilitas Kinerja Pegawai Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cefrida (2014) yang menyimpulkan bahwa Ketaatan Peraturan Perundangan tidak

berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **4.2.3 Pengaruh Kompetensi terhadap Akuntabilitas Kinerja**

Berdasarkan hasil uji parsial (t) pada tabel 4.15 diperoleh nilai signifikansi variabel Kompetensi (X3) sebesar  $0.021 < 0.05$ , maka hipotesis yang diajukan terbukti. Hal ini menunjukkan bahwa Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pegawai instansi pemerintah. Semakin tinggi tingkat kompetensi para aparatur pemerintah yang digambarkan dengan pengalaman dan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan menunjang hasil kinerja yang berkualitas oleh para pegawai instansi pemerintah.

Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja seorang pegawai instansi pemerintah yang efektif akan dapat dicapai jika pegawai memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang baik dan relevan untuk menangani suatu pekerjaan. Pegawai sebagai pelaksana tugas harus selalu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya agar dapat memaksimalkan penerapan pengetahuan dalam praktik pelaksanaan pekerjaan. Sehingga dapat terwujud pertanggungjawaban yang memadai atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penerapan pengetahuan yang maksimal tentunya akan sejalan dengan semakin bertambahnya pengalaman yang dimiliki. Melihat hasil dari penelitian ini maka dapat dikatakan bahwa kompetensi membantu pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan secara

efektif. Semakin tinggi kompetensi seorang pegawai maka akan semakin tinggi pula Kinerja Instansi Pemerintah yang dihasilkannya.

Hasil penelitian pada pengujian hipotesis kedua memberikan bukti bahwa Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pegawai Instansi Pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dan berhasil mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Fahrul Razi (2017), Putri (2015) dan Wahid (2016) yang menyimpulkan bahwa Kompetensi Aparatur Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti mengenai adanya pengaruh standar akuntansi pemerintah, ketaatan pada peraturan perundangan, dan kompetensi terhadap akuntabilitas kinerja. Sampel dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data melalui *software* SPSS 25 dapat dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara simultan variabel Standar Akuntansi Pemerintahan, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan, dan Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Pegawai Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pegawai Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Ketaatan Pada Peraturan Perundangan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pegawai Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pegawai Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.



## 5.2 Saran

Dari kesimpulan di atas, maka berikut saran yang dapat peneliti berikan bagi Pemerintah Daerah dan Peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara agar lebih meningkatkan dan memaksimalkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan memperhatikan kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta memerhatikan Kompetensi sumber daya manusia para pegawai Pemerintahan. Agar dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja pegawai OPD Kabupaten Kutai Kartanegara di masa yang akan datang.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya agar dapat menambahkan variabel-variabel independen lainnya yang dapat mempengaruhi variabel Akuntabilitas Kinerja yang belum diteliti dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Syam kusufi. (2012). *Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi*. Salemba Empat : Jakarta
- Afrina, Dina. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengendalian Intern dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (Studi Persepsian Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru). *Jurnal Fakultas Ekonomi 2(2):1-15*
- Badan Kepegawaian Negara. (2011). Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 13 tahun 2011. tentang *Pedoman Penyusunan, Standar Kompetensi Jabatan*.
- Bastian, Indra, (2013), *Akuntansi Sektor Publik*, Erlangga, Jakarta.
- Cefrida, Mentari. (2014). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekanbaru. *Jurnal. Pekanbaru : Universitas Riau*.
- Chrisnandi, Y. (2016). *Memperbaiki Akuntabilitas Kinerja, Memperbaiki Indonesia*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/menteri-yuddy-memperbaiki-akuntabilitas-kinerja-memperbaiki-indonesia>
- Dewi, R., & Hoesada, J. (2020). The Effect Of Government Accounting Standards, Internal Control Systems, Competence Of Human Resources, And Use Of Information Technology On Quality Of Financial Statements. *International Journal of Innovative Research and Advanced Studies*, Volume 7 Issue 1, 4-10.
- Fatmala, Juanita. (2014). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Universitas Bengkulu. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hafiz, Muhammad. (2017). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( Studi Kasus pada SKPD Pemerintah Propinsi Sumatera Utara )*", *Jom FEKON*, Vol. 4 No. 1

- Instruksi Presiden RI No 7 Tahun 1999 *Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Jannaini, Y. (2012). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Survei pada Dinas Kota Bandung).
- Kepala Lembaga Administrasi Negara. (2003). *Surat Keputusan (SK) Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003* (Vol. 60, Issue 1, pp. 147–173).
- Lumenta, A.L., J. Morasa, L. Mawikere, 2016. “Pengaruh sistem akuntansi pemerintah daerah dan ketaatan peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (kabupaten minahasa selatan)”, *Jurnal EMBA*, Vol.4, Nomor 3, Hal 135-146.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Ni Made, S. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal. Medan : Universitas Sumatera Utara*.
- Pebrianti, S., & Aziza, N. (2018). Effect of Clarity of Budget Objectives, Accounting Control, Reporting Systems, Compliance with Regulation on Performance Accountability of Government Agencies. *Proceeding of Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Aceh: 2018. Hal.396-410.
- Pertiwi, R. U., & Utami, E. R. (2020). *Pengaruh sistem pengendalian intern dan ketaatan pada peraturan perundangan dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi*. 2, 98–118. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol2.art9>
- PP No. 71 Tahun. (2010a). Laporan Realisasi Anggaran. *LRA Menyediakan Informasi Yang Berguna Dalam Memprediksi Sumber Daya Ekonomi Yang Akan Diterima Untuk Mendanai Kegiatan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Periode Mendatang Dengan Cara Menyajikan Laporan Secara Komparatif*.
- PP No. 71 Tahun. (2010b). *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Presiden Republik Indonesia, Jakarta*.
- Putri, Egrinaen. (2015). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip). *JOM Fekon Vol. 2 No. 2*.
- Razi Riska, Fahrul. (2017). *Pengaruh Ketaatan pada peraturan perundangan, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian akuntansi dan kompetensi aparatur pemerintah daerah terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)*. 4(1), 294–308.

- Septiani, G., Taufik, T., & Julita. (2020). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Apakah Dipengaruhi Kompetensi Aparatur, Teknologi Informasi, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan? *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 1(2), 184–201. <https://doi.org/10.31258/jc.1.2.184-201>
- Setiawan, A., Haboddin, M., & Wilujeng, N. F. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang Tahun 2015. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.15294/jpi.v2i1.8483>
- Sofyani, H., & Akbar, R. (2015). Hubungan karakteristik pegawai pemerintah daerah dan implementasi sistem pengukuran kinerja: Perspektif ismorfisma institusional. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art6>
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Methods*). Bandung: Alfabeta.
- Sumiati. (2012). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), Akuntabilitas Keuangan, Ketaatan pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP)*. *Jom FEKON*, Vol. 15 No. 1
- Undang-undang No.13 Tahun 2003. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Wahid, Imam. (2016). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Sistem Pelaporan, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Agam) ”, *Jom FEKON*, Vol. 3 No. 1
- Wahyuni, E.S. dan Dkk. (2016). Pengaruh Budaya Organisasi, *Locus Of Control*, Stres Kerja Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Dan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Pemerintah 140 Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Manajemen*. Volume XX, No.02, Juni 2016: 189-206
- Wardhana, Gede Ary, (2015), Pengaruh Kompetensi pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating. *Jurnal*. Bali : Universitas Udayana.
- Zulharman, Khodri. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, pemahaman akuntansi,& ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Studi pada SKPD kota pekanbaru)”, *Jom FEKON*, Vol. 2, Nomor 2.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

### KUESIONER PENELITIAN

**PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, KETAATAN  
PADA PERATURAN PERUNDANGAN DAN KOMPETENSI TERHADAP  
AKUNTABILITAS KINERJA PEGAWAI INSTANSI PEMERINTAH  
(Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara)**

Yth. Bapak/Ibu Responden,

Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini dibuat untuk meneliti “Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah, Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pegawai Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara”. Informasi Bapak/Ibu sangat berguna bagi penelitian ini, karena Bapak/Ibu adalah orang yang tepat untuk mengutarakan pengalaman dan pendapat mengenai hal ini. Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab pertanyaan dengan jujur dan benar sesuai dengan apa yang Bapak/Ibu rasakan, lakukan dan alami.

Sesuai dengan kode etik penelitian, saya menjamin kerahasiaan semua data. Kesediaan Bapak/Ibu mengisi angket ini adalah bantuan tak ternilai bagi saya. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu yang telah meluangkan waktu untuk mengisi angket ini, dan saya mohon maaf apabila ada pernyataan yang tidak berkenan di hati Bapak/Ibu.

### IDENTITAS RESPONDEN

- Nama : ..... (boleh tidak diisi).
- Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan
- Usia :  < 20 Thn  20-30 Thn  31-40 Thn  
 41-50 Thn  > 51 Thn
- Badan/Dinas : .....
- Jabatan : .....
- Lama menjabat :  0-5 Thn  5-10 Thn  >10 Thn
- Pendidikan terakhir :  SLTA  D1  D2  
 D3  S1  S2  
 S3
- Latar Belakang Pendidikan :  Ekonomi  Sosial  Hukum  
 Ilmu Pemerintahan  Lainnya

### DAFTAR PERTANYAAN

Mohon Bapak/Ibu memberikan penilaian mengenai pernyataan-pernyataan berikut dengan memberikan tanda centang ( √ ) atau tanda silang (X) pada kolom pilihan sesuai dengan skala yang menurut Bapak/Ibu paling tepat. Skor poin jawabannya adalah sebagai berikut :

- Angka 1-5 : Cenderung tidak setuju
- Angka 6-10 : Cenderung setuju









**Lampiran 2. SAMPEL PENELITIAN**

No.	Nama OPD	Sampel
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3 Responden
2	Dinas Kesehatan	3 Responden
3	Dinas Perhubungan	1 Responden
4	Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi	-
5	Dinas Pekerjaan Umum	-
6	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	3 Responden
7	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3 Responden
8	Dinas Sosial	1 Responden
9	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	1 Responden
10	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	-
11	Dinas Perkebunan	1 Responden
12	Dinas Perikanan Dan Kelautan	3 Responden
13	Dinas Peternakan	-
14	Dinas Kehutanan	-
15	Dinas Pertanahan	3 Responden
16	Dinas Pemuda Dan Olahraga	3 Responden
17	Dinas Pendapatan Daerah	-
18	Dinas Komunikasi Dan Informatika	3 Responden
19	Dinas Pertambangan Dan Energi	3 Responden
20	Kantor Pengelola Aset Daerah	1 Responden
21	Kantor Pengelolaan Pasar	-
22	Kantor Kebersihan Dan Pertamanan	-
23	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	3 Responden
24	Badan Pengawas Inspektorat Kabupaten	3 Responden
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Responden
26	Badan Penanaman Modal Dan Promosi Daerah	-
27	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah	-
28	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1 Responden
29	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat	-
30	Badan Kepegawaian Daerah	-
31	Badan Kb, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-
32	Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan	-
33	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	-
34	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
35	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-
36	Badan Kearsipan Dan Perpustakaan	-
37	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Pemerintahan Desa	-
<b>Total Responden</b>		<b>42 Responden</b>

### Lampiran 3. Tabulasi Data

#### Tabulasi Data Akuntabilitas Kinerja

<b>Resp.</b>	<b>Y1.1</b>	<b>Y1.2</b>	<b>Y1.3</b>	<b>Y1.4</b>	<b>Y1.5</b>	<b>Y1.6</b>	<b>Total Y</b>
1	8	8	10	8	8	8	<b>50</b>
2	8	8	8	8	8	8	<b>48</b>
3	8	8	8	8	8	8	<b>48</b>
4	8	8	8	8	8	8	<b>48</b>
5	8	8	8	8	10	8	<b>50</b>
6	8	8	8	8	8	8	<b>48</b>
7	8	8	8	8	8	8	<b>48</b>
8	8	8	8	8	8	8	<b>48</b>
9	8	8	8	8	8	8	<b>48</b>
10	8	8	8	8	8	8	<b>48</b>
11	8	8	8	8	8	8	<b>48</b>
12	8	8	8	8	8	8	<b>48</b>
13	8	8	8	8	8	8	<b>48</b>
14	8	8	10	8	8	8	<b>50</b>
15	8	8	8	8	8	8	<b>48</b>
16	8	8	8	8	8	8	<b>48</b>
17	8	8	8	8	8	8	<b>48</b>
18	8	8	8	8	8	8	<b>48</b>
19	8	8	8	8	8	8	<b>48</b>
20	8	8	8	8	8	8	<b>48</b>
21	8	8	8	8	8	8	<b>48</b>
22	8	8	8	8	8	8	<b>48</b>
23	8	8	8	8	8	8	<b>48</b>
24	8	8	8	8	8	8	<b>48</b>
25	8	8	8	8	8	8	<b>48</b>
26	8	8	8	8	8	8	<b>48</b>
27	8	8	8	8	8	8	<b>48</b>
28	8	8	8	8	8	8	<b>48</b>
29	8	8	8	8	8	8	<b>48</b>
30	8	8	8	8	8	6	<b>46</b>
31	8	8	8	6	6	6	<b>42</b>
32	8	8	8	6	8	8	<b>46</b>
33	10	8	8	8	8	10	<b>52</b>
34	10	10	10	10	10	10	<b>60</b>
35	10	10	10	10	10	8	<b>58</b>
36	8	10	10	10	10	10	<b>58</b>
37	8	8	8	8	8	8	<b>48</b>
38	8	8	10	10	10	8	<b>54</b>
39	10	10	10	10	10	8	<b>58</b>
40	8	10	10	10	10	10	<b>58</b>
41	8	8	8	8	8	8	<b>48</b>
42	8	8	10	10	10	8	<b>54</b>

**Tabulasi Data Standar Akuntansi Pemerintahan**

<b>Resp.</b>	<b>X1.1</b>	<b>X1.2</b>	<b>X1.3</b>	<b>X1.4</b>	<b>X1.5</b>	<b>X1.6</b>	<b>X1.7</b>	<b>X1.8</b>	<b>X1.9</b>	<b>X1.10</b>	<b>Total X1</b>
1	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	<b>80</b>
2	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	<b>80</b>
3	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	<b>80</b>
4	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	<b>80</b>
5	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	<b>80</b>
6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	<b>80</b>
7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	<b>80</b>
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	<b>80</b>
9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	<b>80</b>
10	8	8	10	8	8	8	8	8	8	8	<b>82</b>
11	8	8	8	8	10	10	8	8	8	8	<b>84</b>
12	10	8	8	8	10	8	10	8	8	8	<b>86</b>
13	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	<b>80</b>
14	8	10	8	8	10	8	8	8	8	8	<b>84</b>
15	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	<b>80</b>
16	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	<b>80</b>
17	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	<b>80</b>
18	8	8	8	8	8	8	10	6	6	6	<b>76</b>
19	10	10	8	10	8	8	8	6	8	10	<b>86</b>
20	10	10	8	10	8	8	8	6	8	10	<b>86</b>
21	10	10	8	10	8	8	8	6	8	10	<b>86</b>
22	8	8	10	10	10	8	8	8	10	8	<b>88</b>
23	8	8	8	8	10	10	10	10	8	8	<b>88</b>
24	8	8	10	6	8	8	8	8	8	8	<b>80</b>
25	8	8	5	6	8	8	6	8	8	4	<b>69</b>
26	8	8	8	8	8	6	8	6	6	4	<b>70</b>
27	10	10	10	10	10	10	10	6	6	10	<b>92</b>
28	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	<b>100</b>
29	8	10	8	8	10	8	8	6	8	8	<b>82</b>
30	8	10	8	8	4	6	8	6	6	8	<b>72</b>
31	6	6	6	6	8	6	8	6	8	8	<b>68</b>
32	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	<b>80</b>
33	8	8	8	8	10	10	10	8	8	8	<b>86</b>
34	10	10	10	10	10	10	10	6	8	10	<b>94</b>
35	8	10	8	8	8	6	8	6	6	10	<b>78</b>
36	10	10	10	10	10	10	10	10	8	10	<b>98</b>
37	10	10	10	10	10	8	8	10	10	10	<b>96</b>
38	10	10	8	8	8	8	8	10	8	8	<b>86</b>
39	8	10	8	8	8	6	8	6	6	10	<b>78</b>
40	10	10	10	10	10	10	10	10	8	10	<b>98</b>
41	10	10	10	10	10	8	8	10	10	10	<b>96</b>
42	10	10	8	8	8	8	8	10	8	8	<b>86</b>

**Tabulasi Data Ketaatan Pada Peraturan Perundangan**

<b>Resp.</b>	<b>X2.1</b>	<b>X2.2</b>	<b>X2.3</b>	<b>X2.4</b>	<b>X2.5</b>	<b>Total X2</b>
1	8	8	8	8	8	40
2	8	8	8	8	8	40
3	8	8	8	8	8	40
4	8	8	8	8	8	40
5	8	8	8	8	8	40
6	8	8	8	8	8	40
7	8	8	8	8	8	40
8	8	8	8	8	8	40
9	8	8	8	8	8	40
10	8	8	8	8	8	40
11	8	8	8	8	8	40
12	8	8	8	8	8	40
13	8	8	10	10	10	46
14	10	10	8	8	8	44
15	8	8	8	8	8	40
16	10	10	10	10	8	48
17	8	8	8	8	8	40
18	8	10	10	10	10	48
19	8	10	8	8	8	42
20	8	10	8	8	8	42
21	8	10	8	8	8	42
22	10	8	8	8	8	42
23	10	8	8	10	10	46
24	10	8	10	8	8	44
25	8	10	10	10	8	46
26	8	10	8	8	8	42
27	10	10	10	10	10	50
28	10	10	10	10	10	50
29	8	10	8	8	8	42
30	8	8	8	8	8	40
31	10	10	8	8	8	44
32	8	8	8	8	8	40
33	10	10	8	8	8	44
34	10	10	10	10	10	50
35	10	10	8	10	10	48
36	10	10	10	8	10	48
37	10	10	8	8	8	44
38	8	10	8	8	8	42
39	10	10	8	10	10	48
40	10	10	10	8	10	48
41	10	10	8	8	8	44
42	8	10	8	8	8	42







X1.8	Pearson	.288	.034	.361*	.113	.363*	.460**	.137	1	.632**	.003	.546**
	Correlation											
	Sig. (2-tailed)	.065	.829	.019	.478	.018	.002	.388		.000	.983	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
X1.9	Pearson	.251	-.022	.356*	.304	.464**	.368*	-.068	.632**	1	.152	.538**
	Correlation											
	Sig. (2-tailed)	.108	.890	.021	.050	.002	.016	.671	.000		.336	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
X1.10	Pearson	.663*	.712**	.444*	.704**	.318*	.195	.206	.003	.152	1	.644**
	Correlation											
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.003	.000	.040	.217	.191	.983	.336		.000
	N	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Standar Akuntansi Pemerintah	Pearson	.809*	.596**	.700*	.783**	.724**	.734**	.542**	.546**	.538**	.644**	1
	Correlation											
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

### Validitas Variabel Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X2) Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Ketaatan Pada Peraturan Perundangan
X2.1	Pearson Correlation	1	.453**	.367*	.367*	.482**	.728**
	Sig. (2-tailed)		.003	.017	.017	.001	.000
	N	42	42	42	42	42	42
X2.2	Pearson Correlation	.453**	1	.309*	.309*	.309*	.660**
	Sig. (2-tailed)	.003		.046	.046	.046	.000
	N	42	42	42	42	42	42
X2.3	Pearson Correlation	.367*	.309*	1	.606**	.606**	.755**
	Sig. (2-tailed)	.017	.046		.000	.000	.000
	N	42	42	42	42	42	42
X2.4	Pearson Correlation	.367*	.309*	.606**	1	.737**	.788**
	Sig. (2-tailed)	.017	.046	.000		.000	.000
	N	42	42	42	42	42	42
X2.5	Pearson Correlation	.482**	.309*	.606**	.737**	1	.821**
	Sig. (2-tailed)	.001	.046	.000	.000		.000
	N	42	42	42	42	42	42
Ketaatan Pada Peraturan Perundangan	Pearson Correlation	.728**	.660**	.755**	.788**	.821**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	42	42	42	42	42	42

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

### Validitas Variabel Kompetensi (X3)

#### Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	Kompetensi
X3.1	Pearson Correlation	1	.879**	.414**	.659**	.423**	.418**	.882**
	Sig. (2-tailed)		.000	.006	.000	.005	.006	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42
X3.2	Pearson Correlation	.879**	1	.374*	.637**	.333*	.494**	.867**
	Sig. (2-tailed)	.000		.015	.000	.031	.001	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42
X3.3	Pearson Correlation	.414**	.374*	1	.637**	.132	-.165	.588**
	Sig. (2-tailed)	.006	.015		.000	.404	.296	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42
X3.4	Pearson Correlation	.659**	.637**	.637**	1	.149	.174	.793**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.348	.270	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42
X3.5	Pearson Correlation	.423**	.333*	.132	.149	1	.528**	.563**
	Sig. (2-tailed)	.005	.031	.404	.348		.000	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42
X3.6	Pearson Correlation	.418**	.494**	-.165	.174	.528**	1	.561**
	Sig. (2-tailed)	.006	.001	.296	.270	.000		.000
	N	42	42	42	42	42	42	42
Kompetensi	Pearson Correlation	.882**	.867**	.588**	.793**	.563**	.561**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	42	42	42	42	42	42	42
** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).								
* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).								

### Validitas Variabel Akuntabilitas Kinerja (Y)

#### Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Akuntabilitas Kinerja
Y1	Pearson Correlation	1	.632**	.424**	.458**	.438**	.391*	.647**
	Sig. (2-tailed)		.000	.005	.002	.004	.010	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42
Y2	Pearson Correlation	.632**	1	.704**	.724**	.709**	.542**	.870**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42
Y3	Pearson Correlation	.424**	.704**	1	.769**	.739**	.398**	.840**
	Sig. (2-tailed)	.005	.000		.000	.000	.009	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42
Y4	Pearson Correlation	.458**	.724**	.769**	1	.883**	.534**	.914**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.000		.000	.000	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42
Y5	Pearson Correlation	.438**	.709**	.739**	.883**	1	.539**	.902**
	Sig. (2-tailed)	.004	.000	.000	.000		.000	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42
Y6	Pearson Correlation	.391*	.542**	.398**	.534**	.539**	1	.694**
	Sig. (2-tailed)	.010	.000	.009	.000	.000		.000
	N	42	42	42	42	42	42	42
Akuntabilitas Kinerja	Pearson Correlation	.647**	.870**	.840**	.914**	.902**	.694**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	42	42	42	42	42	42	42

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## Lampiran 5. Uji Reliabilitas

### Reliabilitas Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.853	10

### Reliabilitas Variabel Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.799	5

### Reliabilitas Variabel Kompetensi (X3)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.791	6

### Reliabilitas Variabel Akuntabilitas Kinerja (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.897	6

## Lampiran 6. Uji Asumsi Klasik

### Uji Normalitas Data

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		
Unstandardized Residual		
N	42	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.90950389
Most Extreme Differences	Absolute	.097
	Positive	.080
	Negative	-.097
Test Statistic	.097	
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 <sup>c,d</sup>	
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. This is a lower bound of the true significance.		

## Uji Multikolinearitas

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Standar Akuntansi Pemerintahan	.735	1.361
	Ketaatan pada Peraturan Perundangan	.814	1.228
	Kompetensi	.889	1.125

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja

## Uji Heteroskedastisitas

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.605	3.356		1.074	.290
	Standar Akuntansi Pemerintah	-.023	.061	-.068	-.383	.704
	Ketaatan pada Peraturan Perundangan	-.053	.127	-.075	-.421	.676
	Kompetensi	.000	.030	-.002	-.011	.991

a. Dependent Variable: Abs\_RES

## Lampiran 7. Uji Hipotesis

### Uji F

#### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	55.206	3	18.402	5.214	.004 <sup>b</sup>
	Residual	134.127	38	3.530		
	Total	189.333	41			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja

b. Predictors: (Constant), Standar Akuntansi Pemerintahan, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan, Kompetensi

### Uji t

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.474	8.475		1.826	.076
	Standar Akuntansi Pemerintahan	.178	.073	.341	2.444	.019
	Ketaatan Pada Peraturan Perundangan	.420	.167	.378	2.509	.017
	Kompetensi	.472	.196	.375	2.409	.021

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja

### Koefisien Determinasi

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.544 <sup>a</sup>	.296	.240	1.654

a. Predictors: (Constant), Kompetensi, Ketaatan pada Peraturan Perundangan, Standar Akuntansi Pemerintahan

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja